

INTISARI

Maraknya Usaha Tambak Udang yang ada diProvinsi Jawa timur Kabupaten Sumenep, banyak dari ratusan Tambak Udang yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, hanya beberapa yang resmi mengantongi izin tambak dengan Rincian 700 tambak hanya 6 tambak yan berizin. Permasalahan perusahaan tambak udang ini banyak yang tidak mengantongi izin usaha (ilegal) hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sedangkan dalam peraturan sudah jelas bahwa setiap usaha harus memiliki Surat Izin Usaha untuk melakukan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Tata Kelola Perizinan usaha tambak udang di kabupaten sumenep yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Isi Kebijakan danImplementasi Lingkungan. Sumber data yang digunakan ialah menggunakan langkah paling utama daam penelitian untuk mendapatkan data yang memenuhi standart yakni wawancara, Dokumentasi dan Observasi . Hasil penelitian ini mencangkup pada Teori Merilee S.Grindle yang mana berkaitan langsung dengan (1) isi kebijakan bahwa masih lemahnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten sumenep pelaku usaha tambak udang belum terhadap isi kebijakan yang meliputi target pencapaian, perubahan, sumber daya dan program pelaksanaanya. .dapat dilihat hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik usaha tambak udang masih lemah dalam mentaati peraturan perizinan, hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan hanya 8 dari 700 tambak udang yang berizin dari tahun 2021-2022. (2) Lingkungan Implementasi bahwa, masih lemahnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten sumenep dalam strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan ketatan pelaku usaha tambak udang dalam berizin.

Kata Kunci : Tata Kelola, Perizinan, Tambak Udang

ABSTRACT

The proliferation of shrimp farming businesses in East Java Province, Sumenep Regency, many of the hundreds of shrimp farming in the sumenep regency area, only a few have official farming permits with details of 700 ponds, only 6 of which are licensed. The problem is that many shrimp farming companies do not have business permits (illegal). This has been going on for years. Meanwhile, the regulation make it clear that every business must have a business licence to carry out its business.the aim of this research is to analyze how the anagement of licensing for shrimp farming businesses in sumenepregency is carried out services of sumenep regency. The research method used in this reseach is a qualitative method,the focus of this research is policy content and environmental implementation. The data source used is the most important step in research to obtain data that meets standards, namely inerviews, documentation and observation. The results of this research cover Merilee S. Grindle's theory which is directly releted to (1) the content of the policy, namely the department of investment and one stop integrated services, sumenep regency, shrimp farming business actors are still ewak regarding the policy content which includes achievement targets, chages, resource. And its implementation program. It can be seen from the result of this reseacrthat shrimp farming business owners are still weak in complying with licensing reguations, this is proven by data the show only 8 out of 700 shrimp ponds have permits from 2021 of 2022. (2) implementation environmet, the sumenep regency investement and one stop integrated service is still weak in the strategies carried out to increase the strictness of shrimp farming business actors in obtaining permits.

Keywords: *Governance, licensing, shrimp farming*